

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, massa terbesar adalah berasal dari Partai Nasional Indonesia, partai yang didirikan oleh Soekarno dengan basis massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai komitmen ideologi Pancasila sebagai prinsip dasar perjuangannya.¹

Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai partai politik dengan baik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuat susunan kepengurusan partai mulai dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, hingga Ranting Cabang.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil salah satu tempat penelitian di kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu pada kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 113, Kota Yogyakarta. Yang diketuai oleh H. Danang Rudiyatmoko dengan Sekretaris Sutaryo, A.Md. Dengan jumlah anggota partai sebanyak 39.305.

¹ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, *Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*, 10 April 2017, <http://www.pdiperjuangan.or.id/&lc=id->, (21:24 WIB).

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, H Danang Rudiyatmoko,² Pendidikan Politik adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap partai politik khususnya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai partai ideologi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkewajiban menyadarkan para kepala daerah, wakil daerah bahwa mereka adalah para pelayan rakyat, mereka wajib memberikan pelayanan yang terbaik terhadap rakyat, semua program yang disusun harus berorientasi pada rakyat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berfungsi mewakili ekspresi politik, membangun kompetisi kepemiluan dan dialog politik, mewakili agregasi dan artikulasikepentingan sosial, menyampaikan sosialisasi politik, dan mempersiapkan pemilihan kepemimpinan dan tata kelola, sehingga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menerapkan manajemen kepartaian yang ideal. Melalui pendidikan politik yang telah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan laksanakan didapat anggota partai yang berkualitas yang bisa memberikan kontribusi kepada negara ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai terbuka, dalam proses rekrutmen anggota dilakukan melalui partisipasi aktif tiang anggota untuk memiliki kesadaran ideologis berjuang sesuai dengan garis perjuangan partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajak berpartai secara terbuka dengan kesadaran dalam membangun bangsa dan negara kepada anggota partai dengan meningkatkan disiplin anggota partai, saat diambil keputusan politik anggota partai bisa berperan aktif secara nyata dilapangan menyelesaikan masalah rakyat. Ditengah suasana pragmatisme yang menyeruak

² Hasil Wawancara Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Senin, 3 April 2017, (13.00 WIB).

diberagam bidang kehidupan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunjukkan jati diri dalam turut serta bersama masyarakat. Melalui pendidikan politik ini pula diharapkan hasil kepada para anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar tidak hanya aktif dalam struktur partai diwilayahnya sendiri, melainkan juga harus mampu melakukan pengabdian kedaerah lain untuk melakukan tugas pengorganisasian.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta yaitu pendidikan politik terhadap anggota partai dan pendidikan politik terhadap pemilih. Pelaksanaan pendidikan politik menjadi tanggung jawab partai politik untuk secara khusus meningkatkan kualitas anggota partainya dan secara umum meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dari program kerja yang ditetapkan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta dapat dinyatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai politik yang menamakan dirinya sebagai partai masyarakat kecil, partai ini dalam kebijakannya secara serius melakukan advokasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil melalui perjuangan dalam berbagai bidang kehidupan, di samping tetap memberikan perhatian yang sangat serius pada masalah pengkaderan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta,³ Sutaryo menambahkan melalui pendidikan politik diharapkan tiap anggota partai bisa melakukan jalan ideologis perjuangan partai

³ Hasil Wawancara Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Senin, 3 April 2017, (14.30 WIB).

untuk membentengi diri dari praktik pragmatism politik dan bidang kehidupan lainnya. Proses pendidikan politik yang berjenjang dan bertahap ini harus diikuti oleh setiap anggota partai untuk meningkatkan kualitas diri juga kualitas pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan politik inilah jalan ideologis untuk menanamkan nilai-nilai juang bagi mewujudkan cita-cita bersama, memberikan kesejahteraan untuk rakyat.

Program kerja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan anggota partai dimulai dari struktur organisasi terendah yaitu tingkat ranting sampai pada tingkat pusat serta pendidikan politik bagi masyarakat yang belum menjadi anggota atau kader partai. Program kerja yang berkaitan dengan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta meliputi berbagai kegiatan antara lain dibidang kaderisasi, pembangunan kemasyarakatan, dan kebijakan publik.

Dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pelaksanaan pendidikan politik termuat dalam Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara”. Selain dari Anggaran dasar Partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki peraturan terkait dengan pendidikan politik yang dapat dilihat dari adanya pengaturan tentang tugas-tugas dari ketua-ketua bidang internal dan ketua-ketua bidang program partai.

Dalam merumuskan program kerja atau kegiatan yang akan dilaksanakan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta mengikuti turunan program kerja dari Kongres Partai dan melakukan Rapat Kerja Cabang dan Rapat Koordinasi Cabang untuk membahas dan menetapkan program kerja atau kegiatan partai.

Pendidikan politik yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tujuan sasaran internal dan eksternal. Pendidikan politik internal untuk anggota partai berupa pemantapan kelembagaan, konsolidasi seluruh jenjang organisasi, rekrutmen, pendataan anggota, dan orientasi training anggota partai. Sedangkan pendidikan politik eksternal untuk masyarakat berupa seminar, penyuluhan hukum dan dialog atau diskusi public terhadap isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan terstruktur di setiap wilayah (dapil) Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta yang memiliki koordinator masing-masing yang bertanggung jawab atas wilayahnya.

Pengawasan oleh Pemerintah terhadap kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai dilakukan dengan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban yang diterima oleh Pemerintah dari setiap partai politik. Adapun program kerja terkait pendidikan politik yang telah dilaksanakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta menurut laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran 2015, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta menerima Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp.266.155.256,- dan telah melaksanakan pendidikan politik menurut laporan pertanggungjawaban Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan menggunakan anggaran sebesar Rp.185.728.000.- untuk kegiatan pendidikan politik, yakni :

- a) Diklat Karakterdes Dapil V dan III.
- b) Pelantikan Pengurus 2015-2020;
- c) Diklat Bela Negara; dan
- d) Rakornas Kaderisasi.

2. Pada tahun anggaran 2016, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan anggaran bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 266.155.256,- dan telah melaksanakan pendidikan politik menurut laporan pertanggungjawaban Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan menggunakan anggaran sebesar Rp. 184.352.200 untuk kegiatan pendidikan politik, yakni:

- a) Loka Karya Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta;

- b) Diklat Kaderisasi dan Keanggotaan “Penyegaran dan Orientasi Khusus Dewan Pimpinan Cabang Kota Yogyakarta dan Pengurus Kecamatan se-Kota Yogyakarta;
- c) Dialog Interaktif bulanan “Perspektif Politik dan Hukum Terhadap Dualisme Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan
- d) Capacity Building Outbond Training Dewan Pimpinan Cabang “Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta“, Dengan tema “Membangun Teamwork yang memiliki Prestasi, dedikasi, dan loyalitas terhadap organisasi dalam mencapai tujuan”.

Pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilakukan dengan berbagai cara, metode serta strategi antara lain melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi, kegiatan sosial dan lain-lainnya. Kegiatan pendidikan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hanya selalu bermuatan politik akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi sosial kemasyarakatan serta strategi kebudayaan yang tidak terlepas dari ciri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai yang lahir dari semangat perjuangan oleh orang kecil. Pendidikan politik oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota partainya saja namun juga sebagai upaya tanggung jawab partai politik untuk ikut memberikan pemahaman dan penyadaran masyarakat akan politik.

Proses pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta tidak

sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan partai dan masyarakat. Hal tersebut disebabkan adanya kendala-kendala sehingga membuat hasilnya kurang maksimal. Kendala tersebut antara lain karena minimnya persiapan untuk melakukan sosialisasi ke bawah. Kendala lain yang berasal dari dalam internal partai yaitu komunikasi kurang baik Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, dan Pengurus Ranting yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pengurus pada tingkat ranting atau desa yang tidak aktif sehingga ketika diadakannya pendidikan politik di Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat berpartisipasi. Kemudian sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik juga menjadi kendala.

B. Hasil Penelitian Pendidikan Politik Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta

Partai Gerakan Indonesia Raya adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan dan diketuai oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto. Partai Gerakan Indonesia Raya berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Pengurus dan aktivis partai ini dicirikan dengan pakaian safari lengan pendek dan panjang, serta kopiah hitam.⁴

Pada penelitian ini, peneliti mengambil salah satu tempat penelitian di kepengurusan Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu pada kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta, yang berlokasi di jalan

⁴ Partai Gerakan Indonesia Raya, *Profil Partai Gerakan Indonesia Raya*, 10 April 2017, <http://partaigerindra.or.id/uploads/manifesto-perjuangan-partai-gerindra.pdf&lc=id-> , (21:40 WIB).

Perintis Kemerdekaan, Nomor 19 A, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Yang diketuai oleh Anton Prabu Semendawai., S.H., M.Kn dengan Sekretaris Hartanto., S.E. Dengan jumlah anggota partai sebanyak 29.867.

Anton Prabu Semendawai selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta menyatakan,⁵ Untuk merumuskan dan menetapkan program kerja pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta, kami berdasar pada AD/ART Partai, Rapat Kerja Partai dan dengan melihat kondisi sosial dan politik masyarakat di Kota Yogyakarta. Program Partai Gerakan Indonesia Raya secara nasional dijabarkan di setiap daerah dalam berbagai tingkatan struktur partai sampai pada tingkat kelurahan. Mengacu pada program nasional itulah Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya merumuskan program kerja terkait pendidikan politik. Pengaturan mengenai pendidikan politik dapat dilihat dalam Anggaran Dasar partai dalam Pasal 12 ayat (2) mengenai fungsi partai, menyatakan bahwa “Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara”. Selain dari Anggaran dasar Partai, Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki peraturan terkait dengan pendidikan politik yang dapat dilihat dari adanya pengaturan pelaksana dari Anggaran Dasar No. 15 tahun 2015 tentang peraturan partai.

Kegiatan pendidikan politik adalah penting, karena melalui proses ini akan melahirkan pemahaman tentang bagaimana kondisi daerah yang seharusnya diarahkan ke wajah perpolitikan yang santun dan berwibawa, dan Partai Gerakan

⁵ Hasil Wawancara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Rabu, 5 April 2017, (10.30 WIB).

Indonesia Raya akan selalu memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat luas, dan itu harus menjadi landasan ide serta gagasan segenap anggota partai untuk mengkomodir aspirasi rakyat. Pendidikan politik adalah salah satu jalan menuju demokrasi partai politik moderen, partai yang ada harus lebih maju, kreatif, namun harus aktif memberikan sumbangsi pada pembangunan yang tentunya bersinergi dengan pemerintahan yang ada, Partai Gerakan Indonesia Raya hadir bukan hanya saat even-even kontestasi politik, tetapi selalu hadir pada setiap sendi kehidupan masyarakat yang diwakilinya. Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Yogyakarta telah menginstruksikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Yogyakarta untuk menggelar pelatihan dan kursus politik dan untuk semua anggota partai agar jangan ragu untuk belajar dan terus berjuang. Tujuan khusus dilaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai ini sengaja digelar dalam rangka menciptakan anggota-anggota partai yang benar-benar militan dan bisa diandalkan. Anggota-anggota partai yang telah melalui proses pendidikan politik tersebut diharapkan memiliki keluasan pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dapat meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan, dan tentu tidak bisa dipungkiri bahwa anggota-anggota partai harus bisa membangun masyarakat madani dimana anggota partai itu bermasyarakat.

Menurut Hartanto selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta,⁶ “Partai politik adalah institusi yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat lewat pendidikan. Kita sadari bahwa pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi maju mundurnya suatu bangsa. Pendidikan politik merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan partai politik menurut undang-undang partai politik, dimana partai wajib melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat agar kedua sasaran dari pendidikan politik ini lebih mengetahui dan paham akan hak-hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan hal yang urgen yang harus dilaksanakan partai politik. Karena pertama, agar masyarakat dan anggota partai mengetahui seluk-beluk masalah sistem politik yang berlaku di Indonesia, mengetahui tentang sistem kepartaian. Kedua, harus mengetahui konstitusi kepartaian, begitu anggota partai telah masuk pada partai politik dia harus tahu *platform* partai politiknya, idealismenya, sasarannya, tujuannya partai tersebut harus dibawa kemana. Terkait pendidikan politik bagi anggota partai, kami memberikan materi tentang ideologi partai dimana pesertanya adalah anggota partai dan simpatisan partai. Seperti pada tahun 2016, Partai Gerakan Indonesia Raya melaksanakan pendidikan politik untuk anggota partai dan masyarakat. Partai Gerakan Indonesia Raya dalam tahun anggaran 2017 ini, berencana melaksanakan pendidikan politik pada tingkat kota dan kecamatan, dan sasarannya adalah pengurus dan anggota partai, tokoh

⁶ Hasil Wawancara Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Rabu, 5 April 2017, (11.30 WIB).

masyarakat, dan umum, dan yang bertanggungjawab adalah setiap Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerakan Indonesia Raya.

Pengawasan oleh Pemerintah terhadap kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai dilakukan dengan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban yang diterima oleh Pemerintah dari setiap partai politik. Adapun program kerja terkait pendidikan politik yang telah dilaksanakan Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta menurut laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Pada tahun anggaran 2015, Partai Gerakan Indonesia Raya mendapatkan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp.135.651.000,- dan telah melaksanakan pendidikan politik menurut laporan pertanggungjawaban Partai Gerakan Indonesia Raya yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan menggunakan anggaran sebesar Rp. 82.350.000,- untuk kegiatan pendidikan politik yakni :
 - a) Pelatihan Kepemimpinan Anggota Partai Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta;
 - b) Pelaksanaan Sekolah Politisi Muda Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta;
2. Pada tahun anggaran 2016, Partai Gerakan Indonesia Raya mendapatkan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp.135.651.000,- dan telah melaksanakan pendidikan politik menurut

laporan pertanggungjawaban Partai Gerakan Indonesia Raya yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan menggunakan anggaran sebesar Rp. 99.750.000,- untuk kegiatan pendidikan politik, yakni :

- a) Pelatihan anggota Partai Gerakan Indonesia Raya tingkat Kota Yogyakarta;
- b) Pendidikan politik bagi anggota partai Gerakan Indoensia Raya dan masyarakat , “ Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan”;
- c) Seminar “ Revolusi Putih ” ; dan
- d) Jambore.

Hartanto menambahkan,⁷ Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya dalam fungsinya sebagai sarana pendidikan politik mempunyai kendala dalam setiap pelaksanaan program-program pendidikan politik tersebut. Namun kendala tersebut terjadi sebagai bentuk prosesi alamiah dalam setiap perjalanan organisasi yang sedang berproses menuju ketercapaian tujuannya. Kendala-kendala tersebut adalah mengenai pendanaan, latar belakang pendidikan anggota partai, materi dan perencanaan pendidikan anggota partai kurang optimal.

C. Analisis Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Di Kota Yogyakarta Kepada Anggota Partai

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

⁷ Hasil Wawancara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Rabu, 5April 2017, (10.30 WIB).

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik diwajibkan memberikan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tujuan dari partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Dalam pelaksanaan pendidikan politik, partai politik mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana yang dimaksud diatas dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Menurut Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bantuan keuangan tersebut

digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen). Pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud di atas dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan:

1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara;
2. Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan kesetaraan gender dengan tujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud diatas, antara lain berupa :

1. Seminar;
2. Lokakarya;
3. Dialog interaktif;

4. Sarasehan; dan

5. Workshop.

Dalam penyelenggaraan pendidikan politik, pemerintah daerah/kota dapat memberikan fasilitasi kepada partai politik yang merupakan salah satu dari kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik untuk mempermudah proses pengembangan kehidupan demokrasi dalam kegiatan pendidikan politik yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang dimaksud di atas meliputi :

1. Konsultasi;
2. Koordinasi;
3. Penyediaan sarana, prasarana; dan
4. Materi pendidikan politik.

Pemerintah daerah/kota memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik terhadap kegiatan, antara lain:

1. Seminar dan loka karya;
2. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
3. Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
4. Pagelaran seni dan budaya;
5. Jambore, perkemahan, napak tilas; dan
6. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

Dalam pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik yang diberikan oleh pemerintah daerah/kota kepada kelompok sasaran fasilitasi dalam hal ini partai politik dapat melakukan konsultasi, koordinasi dan menerima fasilitas penyediaan sarana dan prasarana melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam hal konsultasi dan koordinasi sebagaimana yang dimaksud di atas dapat dilakukan dengan cara lisan melalui tatap muka atau sarana telekomunikasi dan dengan cara tertulis melalui pengiriman surat atau sarana telekomunikasi lainnya. Sedangkan dalam penyediaan sarana dan prasarana dapat berupa narasumber, tempat, dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dan dalam hal fasilitas penyediaan materi pendidikan politik juga difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, materi pendidikan politik yang dimaksud adalah materi wajib dan materi pilihan. Adapun materi wajib meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan materi pilihan, antara lain:

1. Demokrasi;
2. Hak Asasi Manusia;
3. Sistem Pemerintahan;
4. Pertahanan dan Keamanan;
5. Budaya dan Etika Politik;
6. Kebijakan Publik;

7. Pendidikan Kewarganegaraan;
8. Politik Kesejahteraan Sosial;
9. Politik Tata Ruang dan Lingkungan;
10. Pemerintahan yang baik;
11. Globalisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia;
12. Partai Politik;
13. Otonomi Daerah;
14. Masyarakat Sipil; dan
15. Pasar dan Dunia Usaha.

Dalam sebuah organisasi partai politik, Anggaran Dasar (AD) merupakan kebijakan tertinggi dalam partai yang menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya dalam melaksanakan aktivitas politik. Sementara Anggaran Rumah Tangga merupakan aturan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai isi Anggaran Dasar partai politik tersebut. Begitu pun partai politik di Kota Yogyakarta dalam hal ini, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta sebagai sample dari penelitian ini. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di jadikan rujukan oleh partai tersebut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan partai. Sehingga dapat dikatakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga memberi arahan kepada partai tentang apa yang harus dilakukan oleh partai. Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik, dalam Anggaran Dasar partai politik harus memuat pendidikan politik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dimana partai politik mencantumkan aturan mengenai

pendidikan politik dalam Anggaran Dasar agar menjadi pedoman kegiatan atau aktivitas politik dalam melaksanakan pendidikan politik untuk anggota partai ataupun masyarakat.

Dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun Partai Gerakan Indonesia Raya tidak ada pasal yang menjelaskan secara tegas mengenai kegiatan pendidikan politik melainkan hanya tersirat dalam beberapa pasal saja. Seperti dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terletak dalam Pasal 8 ayat (2) dan Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya, dalam pasal 12 ayat (2) mengenai fungsi partai, menyatakan bahwa “Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara”. Selain dari Anggaran dasar Partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki peraturan terkait dengan pendidikan politik yang dapat dilihat dari adanya pengaturan tentang tugas-tugas dari ketua-ketua bidang internal dan ketua-ketua bidang program partai, peraturan Dewan Pimpinan Cabang Partai dll.

Dalam melaksanakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perlu adanya program kerja terkait pendidikan politik yang bersifat teknis yaitu program kerja yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas politik partai. Mengenai rumusan program kerja yang akan dilaksanakan oleh dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun dewan pimpinan cabang Partai gerakan Indonesia Raya, kedua partai tersebut mengacu pada Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga partai, hasil dari rapat

kerja partai yakni program nasional ke program daerah dan dengan melihat kondisi masyarakat dalam hal ini masyarakat Kota Yogyakarta.

Dengan melihat pemaparan data melalui wawancara dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta yang diberikan kepada partai politik terkait pendidikan politik, maka dapat dilihat bahwa partai-partai tersebut telah melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat kita lihat pada penggunaan anggaran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, partai-partai politik di Kota Yogyakarta telah menggunakan melebihi 60% untuk kegiatan pendidikan politik yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Partai-partai di Kota Yogyakarta melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai seperti pendidikan dan pelatihan kader, kegiatan sosial, jambore, sosialisasi, seminar dan lain-lain yang menyangkut tentang pendidikan politik.

Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik yang positif. Sebagaimana juga yang diatur dalam 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan partisipasi politik, inisiatif, kemandirian, kedewasaan, dan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain partisipasi politik, pendidikan politik juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu yang dapat dicapai melalui arahan politik secara langsung, baik melalui formal maupun non-formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan dan pengajaran politik langsung yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik. Kesadaran politik masyarakat di Kota Yogyakarta dapat kita lihat pada penambahan jumlah kader / anggota partai politik.

Seperti halnya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta pada periode 2012-2014 memiliki total anggota sebanyak 16.546 orang. Dan periode 2015-2017 telah memiliki anggota sebanyak 39.305 orang yang terdaftar memiliki kartu anggota partai. Sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Yogyakarta pada periode 2012-2014 memiliki total anggota sebanyak 13.287 orang. Dan periode 2015-2017 telah memiliki anggota sebanyak 29.867 orang yang terdaftar memiliki kartu anggota partai. Bertambahnya jumlah anggota partai tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan pendidikan politik yang optimal telah dilaksanakan oleh partai politik yang ada di Kota Yogyakarta.

Bertambahnya jumlah anggota partai di Kota Yogyakarta khususnya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya menandakan bahwa kedua partai tersebut telah melaksanakan dan mengoptimalkan amanah yang diberikan oleh undang-undang dengan baik. Dengan banyaknya masyarakat yang ikut bergabung dengan kedua partai tersebut diharapkan menjadi angin segar dalam perpolitikan di Indonesia apabila dibarengi

dengan kelanjutan proses pendidikan politik yang terus dilaksanakan oleh setiap partai politik dengan tepat dan konsisten. Namun tak lupa partai politik harus sangat selektif dalam merekrut anggota partainya, sehingga pelaksanaan sistem politik yang akan dijalankan oleh para anggota partai akan berjalan secara professional dan jauh dari berbagai masalah hukum.